

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persediaan

2.1.1. Definisi

Persediaan (*Inventory*) adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan termasuk aset yang merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Mursyidi, 2009)

2.1.2. Fungsi Persediaan

Keberadaan dari Persediaan tidak hanya sebagai persediaan yang tidak memiliki kegunaan, tetapi juga memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsi dari persediaan menurut Rangkutin (2007) sebagai berikut:

1. Fungsi *Decoupling*

Fungsi *Decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada *supplier*.

Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga “kebebasannya”. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelanggan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut *fluctuation stock*.

2. Fungsi *Economic Lot Sizing*

Persediaan *lot size* ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan perunit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, risiko, dan sebagainya).

3. Fungsi Antisipasi

Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (*seasonal inventories*).

Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan barang-barang selama periode tertentu.

Dalam hal ini perusahaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut persediaan pengaman (*safety stock/inventories*).

2.1.3. Jenis Persediaan

Persediaan tidak hanya memiliki fungsi, namun persediaan juga memiliki jenis. Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis menurut Rangkutin (2007) yaitu sebagai berikut:

A. Menurut Fungsinya

1. *Batch Stock/Lot Size Inventory*

Persediaan yang diadakan karena kegiatan membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan saat itu.

2. *Fluctuation Stock*

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan.

3. *Anticipation Stock*

Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat.

B. Persediaan Pengaman (*Safety Stock*)

Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan

bahan (*stock out*). Ada beberapa factor yang menentukan besarnya persediaan pengaman yaitu:

- a. Penggunaan bahan baku rata-rata;
- b. Factor waktu;
- c. Biaya-biaya yang digunakan.

C. Menurut Fisik

1. Persediaan bahan mentah (*raw material*) yaitu persediaan barang-barang berwujud, seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi.
2. Persediaan komponen-komponen rakitan (*putrched parts/components*), yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk.
3. Persediaan bahan pembantu atau penolong (*supplies*), yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi.
4. Persediaan dalam proses (*work in process*), yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
5. Persediaan barang jadi (*finished goods*), yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan.

2.1.4. Biaya Dalam Persediaan

Biaya persediaan merupakan keseluruhan biaya operasi atas sistem persediaan.

Biaya persediaan didasarkan pada parameter ekonomis yang relevan dengan jenis biaya menurut Yamit (1999) sebagai berikut:

1. Biaya Pembelian (*purchased cost*)

Biaya pembelian adalah harga per unit apabila item dibeli dari pihak luar, atau biaya produksi per unit apabila diproduksi dalam perusahaan.

Biaya per unit akan selalu menjadi bagian dari biaya item dalam persediaan. Untuk pembelian item dari luar, biaya per unit adalah harga beli ditambah biaya pengangkutan. Sedangkan untuk item yang diproduksi di dalam perusahaan, biaya per unit adalah termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya overhead pabrik.

2. Biaya Pemesanan (*ordes cost/setup cost*)

Biaya pemesanan adalah biaya yang berasal dari pembelian pesanan dari supplier atau biaya persiapan (*setup cost*) apabila item diproduksi di dalam perusahaan. Biaya ini diasumsikan tidak akan berubah secara langsung dengan jumlah pemesanan. Biaya pemesanan dapat berupa biaya membuat daftar permintaan, menganalisis supplier, membuat pesanan pembelian, penerimaan bahan, inspeksi bahan, dan pelaksanaan proses transaksi. Sedangkan biaya persiapan dapat berupa biaya yang dikeluarkan akibat perubahan proses produksi, pembuatan skedul kerja, persiapan sebelum produksi, dan pengecekan kualitas.

3. Biaya Simpan (*holding cost*)

Biaya simpan adalah biaya yang dikeluarkan atas investasi dalam persediaan dan pemeliharaan maupun investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Biaya simpan dapat berupa: biaya modal, pajak, asuransi, pemindahan persediaan, keusangan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memelihara persediaan.

4. Biaya Kekurangan Persediaan (*stockout cost*)

Biaya Kekurangan Persediaan adalah konsekuensi ekonomis atas kekurangan dari luar maupun dari dalam perusahaan. Kekurangan dari luar terjadi apabila pesanan konsumen tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kekurangan dari dalam terjadi apabila departemen tidak dapat memenuhi kebutuhan departemen yang lain. Biaya kekurangan dari luar dapat berupa biaya *backorder*, biaya kehilangan kesempatan penjualan, dan biaya kehilangan kesempatan menerima keuntungan. Biaya kekurangan dari dalam perusahaan dapat berupa penundaan pengiriman. Jika terjadi kekurangan atas permintaan suatu item, perusahaan harus melakukan *backorder* atau mengganti dengan item lain atau membatalkan pengiriman. Dalam situasi seperti ini bukan kerugian penjualan yang terjadi tetapi penundaan dalam pengiriman. Dalam situasi seperti ini bukan kerugian penjualan yang terjadi tetapi penundaan dalam pengiriman. Untuk mengatasi masalah ini secara khusus perusahaan melakukan pembelian darurat atas item tersebut dan perusahaan akan menanggung biaya tambahan (*extra cost*) untuk

pesanan khusus yang dapat berupa biaya pengiriman secara cepat, dan tambahan biaya pengepakan.

2.1.5. Klasifikasi Masalah Persediaan

Masalah persediaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, yaitu atas dasar pengulangan, sumber suplai, permintaan, tenggang waktu (*lead time*), dan sistem persediaan. Masalah klasifikasi persediaan dengan pembagian menurut Yamit (1999) sebagai berikut:

1. Pengulangan
 - a. Pesanan Tunggal (sekali pisan)
 - b. Pesanan Berulang
2. Sumber Suplai
 - a. Berasal dari luar
 - b. Berasal dari dalam
3. Permintaan
 - a. Permintaan Tetap (konstan)
 - b. Permintaan Variabel (berubah)
 - c. Permintaan Independen
 - d. Permintaan Dependen
4. Tenggang Waktu (*lead time*)
 - a. Lead Time Tetap
 - b. Lead Time Variabel (berubah)

5. Sistem Persediaan

- a. Kontinyu (terus menerus)
- b. Periodik
- c. *Material Requirement Planning*
- d. *Distribution Requirement Planning*
- e. Pesanan Tunggal

2.2. Perlakuan Akuntansi

2.2.1. Standar Akuntansi Persediaan

Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) mendefinisikan persediaan sebagai berikut:

“Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan pengertian persediaan di atas, maka persediaan adalah asset berwujud berupa perlengkapan kantor dan barang lain untuk kegiatan operasi serta barang lain baik melalui proses produksi oleh pemerintah maupun diperoleh dan disimpan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah serta mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Secara teknis, persediaan tersebut diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat pada akhir tahun berdasarkan hasil penghitungan fisik pada akhir periode.

Persediaan dicatat nilai sebesar biaya perolehan, biaya standar, atau nilai wajar. Biaya perolehan menjadi dasar perhitungan nilai persediaan apabila persediaan tersebut diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan meliputi biaya pembelian, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang dapat dibebankan kepada persediaan yang bersangkutan sampai persediaan tersebut tersedia. Potongan atau diskon mengurangi nilai perolehan persediaan tersebut. (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009)

2.2.2. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik, karena akuntansi pemerintahan saat ini menggunakan metode fisik dalam pencatatan persediaan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan asset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan atau diakui sebagai persediaan. (Mursyidi, 2009)

2.2.3. Pengukuran Nilai Persediaan

Pada saat melakukan pengukuran nilai persediaan, menurut Mursyidi (2009) terdapat acuan bahwa persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2.2.4. Pencatatan Persediaan

Menurut Rahmono & Sholihin (2017), Pencatatan persediaan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengatur.

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continue* membutuhkan control yang besar, seperti obat-obatan. Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK). Metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname*.

Tabel 2.1
Pencatatan Persediaan Metode Perpetual vs Periodik

Transaksi	Jurnal (dalam jutaan Rupiah)	
	Perpetual	Periodik
Pembelian persediaan senilai Rp 10 juta	Persediaan (D) 10 Kas (K) 10	Persediaan (D) 10 Kas (K) 10
Pemakaian persediaan senilai Rp 3 juta	Beban Persediaan (D) 3 Persediaan (K) 3	Tidak membuat jurnal
Penyesuaian sisa persediaan senilai Rp 7 juta	Tidak membuat jurnal	Beban Persediaan (D) 3 Persediaan (K) 3

Sumber: Rahmono & Sholihin, 2017

Metode penilaian persediaan dapat dilakukan dengan empat cara yaitu identifikasi khusus, rata-rata, LIFO dan FIFO.

- a. Metode Identifikasi Khusus

Metode identifikasi khusus mensyaratkan bahwa setiap barang yang disimpan harus secara khusus sehingga biaya per unitnya dapat diidentifikasi setiap waktu. Metode ini memungkinkan diperlukan nya identifikasi setiap waktu. Metode ini memungkinkan diperlukan nya identifikasi biaya per unit

khusus untuk setiap barang yang terjual pada tanggal penjualan dan tiap barang yang tetap ada persediaannya.

b. Metode Rata-Rata

Dalam metode ini barang-barang yang dipakai atau dijual dibebani harga pokok rata-rata perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Keterbatasan dalam metode rata-rata adalah nilai persediaan secara terus-menerus mengandung pengaruh dari *cost* paling awal dan nilai-nilai tersebut bisa mempunyai *lag* yang signifikan di belakang *current price* dalam metode yang mengalami perubahan harga dengan cepat, naik dan turun

c. Metode FIFO

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang yang digunakan sesuai dengan urutan pembeliannya. Metode ini mengasumsikan bahwa karang pertama dibeli adalah barang yang pertama digunakan atau dijual. Keunggulan FIFO adalah mendekatkan persediaan akhir dengan biaya berjalan. Karena barang atau persediaan pertama yang dibeli adalah persediaan yang akan pertama digunakan dalam memproses persediaan, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari persediaan akhir, terutama jika laju perputaran persediaan cepat. Kelemahan dari FIFO adalah bahwa biaya berjalan tidak dibandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi.

d. Metode LIFO

Metode LIFO memandikan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Persediaan akhir akan ditentukan dengan

menggunakan unit total sebagai dasar perhitungan dengan mengabaikan tanggal-tanggal pembelian yang terlibat. Perusahaan akan memilih metode yang bisa memberikan keuntungan, berupa pembayaran pajak yang relatif lebih kecil.

Pada awal PSAK 14 (1994) ada tiga metode yang diakui FIFO, LIFO dan metode rata-rata. Sejak tahun 2009 PSAK Indonesia melarang metode LIFO yang digunakan oleh perusahaan karena sedikit demi sedikit mulai mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standar*) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang bertujuan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi internasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 juga hanya memperbolehkan menggunakan metode FIFO dan rata-rata dan tidak menggunakan metode LIFO. Ada beberapa alasan larangan penggunaan metode LIFO yaitu:

- a. Penggunaan LIFO lebih banyak dimaksudkan untuk menghindari (menunda) kewajiban pajak terutama ketika inflasi daripada kepentingan ekonomi. Secara teori memang kewajiban pajak termasuk tersebut hanya tertunda sementara, namun selamat terus terjadi inflasi, maka penundaan pajak tersebut akan tetap dan mungkin bertambah yang kemudian akan menyebabkan penundaan pajak menjadi permanen.
- b. LIFO *Reserve* yang disajikan dalam laporan keuangan seringkali dinilai lebih rendah daripada yang sebenarnya terjadi. Ada indikasi kecurangan yang dinilai oleh para analisis pajak. Hal ini menyebabkan LIFO semakin dinilai hanya

mengejar keuntungan tax-saving. Oleh karena itu para analisis pajak tersebut berpendapat bahwa LIFO sebaiknya dihapuskan.

Penilaian persediaan PSAP Nomor 05 mengatur bahwa entitas pemerintahan dapat menggunakan:

- a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis

Sementara Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengatur lebih rinci yaitu persediaan dinilai dengan metode FIFO. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Maka dengan pengaturan ini maka Pemda harus menggunakan metode FIFO.

Implementasi SAP akrual mensyaratkan penghitungan dan penyajian beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. PSAP 05 mengatur bahwa dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Jika persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan.

Sebagai contoh pencatatan beban persediaan sebagai berikut. Dinas Pendidikan memiliki saldo awal persediaan alat tulis kantor (ATK) tahun 2014 senilai lima puluh juta rupiah. Selama tahun 2014 persediaan yang ATK yang dibeli sebesar seratus lima puluh juta rupiah. Pencatatan persediaan ATK menggunakan metode periodik. Pada akhir periode, setelah dilakukan penghitungan persediaan yang masih tersisa sebesar tiga puluh juta rupiah. Maka pemakaian persediaan lima puluh juta ditambah seratus lima puluh juta dikurangi tiga puluh juta rupiah maka hasilnya seratus tujuh puluh juta rupiah. Jurnal yang perlu dibuat pada saat pembelian dan jurnal penyesuaian akhir periode adalah (dalam jutaan rupiah).

Tabel 2.2
Jurnal saat Penyesuaian (Pendekatan Aset)

Tanggal	Jurnal Finansial	Jurnal Realisasi Anggaran
Saat Pembelian	Persediaan (D) 150 Kas (K) 150	Belanja barang (D) 150 Perubahan SAL (K) 150
31 Desember 2014	Beban Persediaan (D) 170 Persediaan (K) 170	Tidak ada jurnal

Sumber: Rahmono & Sholihin, 2017

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Contoh penjurnalan di atas adalah menggunakan pendekatan aset karena ketika pembelian terjadi dicatat sebagai aset (persediaan di debit). Pada pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat SKPD dan persediaan obat di rumah sakit. Pada pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan (beban persediaan di debit). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang

akan segera digunakan misalnya untuk suatu kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan sebagainya. Contoh penjurnalan persediaan dengan metode beban untuk kasus di atas adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah).

Tabel 2.3
Jurnal saat Penyesuaian (Pendekatan Beban)

Tanggal	Jurnal Finansial	Jurnal Realisasi Anggaran
Saat Pembelian	Beban Persediaan (D) 150 Kas (K) 150	Belanja Barang (D) 150 Perubahan SAL (K) 150
31 Desember 2014	Beban Persediaan (D) 20 Persediaan (K) 20	Tidak ada jurnal

Sumber: Rahmono & Sholihin, 2017

2.2.5. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan dalam laporan neraca sebagai aset lancar. Akun tandingannya adalah akun “Cadangan Persediaan” sebagai komponen akun ekuitas lancar. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain disajikan dalam neraca yang mencerminkan penggunaan akun dan nilai persediaan, juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), misalnya mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan apakah menggunakan harga perolehan, biaya standar atau nilai wajar; penjelasan mengenai barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat; penjelasan tentang kondisi persediaan misalnya persediaan yang rusak, using atau kadaluarsa. (Mursyidi, 2009)

Tabel 2.4
Contoh Neraca Instansi Pemerintah

SKPD A NERACA Per 31 Desember 2013			
ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Utang PFK	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Uang Muka dari Kas Daerah	xxx
Piutang Retribusi Pelayanan	xxx	Pendapatan Diterima di muka	xxx
Persediaan	xxx	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	Jumlah kewajiban Jangka Pendek	xxx

Sumber: Rahmono & Sholihin, 2017